

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang di setiap daerahnya memiliki ciri khas wisata yang berbeda-beda sehingga dengan adanya keanekaragaman di setiap daerah tersebut dapat dijadikan sebagai tempat wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung (Rudyanto, 2004). Tentunya wisatawan tidak hanya dari daerah yang bersangkutan saja melainkan juga dari wisatawan internasional. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang menjadi bagian penting dalam pembangunan suatu negara maka harus dikelola dengan sebaik-baiknya (Jaffe & Pasternak, 2004).

Pengembangan pariwisata dapat membawa perubahan baik untuk daerah pariwisata itu sendiri maupun daerah lainnya. Perubahan tersebut tentunya dapat membawa perubahan yang lebih baik apabila dapat dikelola dan dijalankan sesuai dengan kebijakan maupun prosedur yang telah ditetapkan. Namun apabila perubahan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan maka dapat membawa perubahan yang dapat menyebabkan kerugian pada daerah tersebut. Industri pariwisata di Indonesia dapat dikatakan sebagai pemasukan suatu negara. Sehingga pariwisata menjadi salah satu alternatif yang memiliki manfaat dalam penerimaan suatu daerah. Seseorang memiliki motif maupun tujuan untuk melakukan kegiatan pariwisata baik karena untuk menikmati perjalanan, rekreasi, kebudayaan, olahraga, dagang, dan rekreasi. (Kuwena & Widyatmaja, 2017)

Pada hakikatnya dalam pengelolaan pariwisata yang baik dapat berpengaruh juga terhadap tingkat wisatawan yang berkunjung. Maka dari itu faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan wisata perlu diperhatikan dengan baik. Dalam penyelenggaraan pariwisata dapat berjalan dengan baik apabila terdapat unsur-unsur dalam

pelaksanaanya dapat berkaitan maupun berhubungan satu dengan yang lainnya yang melibatkan para stakeholders. Sehingga dalam pengelolaan pariwisata harus dapat dilaksanakan dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan pariwisata tersebut, baik dari setor pendapatan, fasilitas sarana dan prasarana, kepuasan pengunjung, dan manfaat dari kegiatan pariwisata tersebut, untuk mencapai suatu keberhasilan pariwisata pada suatu daerah maka diperlukan dengan adanya pengembangan kebijakan pada sektor pariwisata yang harus dapat diperhatikan dengan cermat supaya tidak menimbulkan dampak negatif di daerah pariwisata tersebut. (Kuwena & Widyatmaja, 2017)

Sedangkan, menurut Koen Meyers (2009) pariwisata merupakan sebuah aktivitas perjalanan yang dapat dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu berlibur serta tujuan-tujuan lainnya. Sehingga dengan adanya pariwisata dapat dijadikan sebagai salah satu kegiatan perpindahan aktivitas lain untuk sementara waktu dengan tujuan rekreasi, refreshing, menetap sementara, dan sebagainya.

Lampung sebagai salah satu provinsi di Indoneisa yang mempunyai potensi alam dan budaya yang unik serta menarik sehingga dapat dijadikan sebagai objek wisata. Provinsi Lampung memiliki potensi pariwisata karena letaknya yang cukup strategis dan berada di ujung pulau sumatera bagian selatan. Dimana letak tersebut dapat dijadikan sebagai pintu gerbang utama dalam menuju pulau sumatera dari arah pulau jawa (Primadona, 2011). Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai pusat objek bagi para wisatawan baik dari tingkat nasional maupun internasional untuk melakukan kegiatan pariwisata serta dapat dijadikan sebagai mata rantai tujuan wisata (Primadona, 2011). Sarana dan prasarana dalam pengembangan pariwisata menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap objek daya tarik wisata (Fajriah, 2014). Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka dapat dijadikan sebagai suatu

upaya dalam meningkatkan potensi daerah wisata tersebut. Fasilitas sarana dan prasarana memiliki pengaruh maupun kaitannya dengan daya tarik pengunjung terhadap daerah wisata tersebut. Apabila suatu daerah wisata memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang baik maka akan berpengaruh terhadap pengunjung untung mendatangi daerah wisata tersebut (Soebiyantoro, 2008). Salah satu peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata secara umumnya adalah untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana, memperbaiki fasilitas, menjalin hubungan antara pemerintah dengan swasta maupun masyarakat (Ghani, 2017).

Kepariwisataan mempunyai fungsi dan peranan dalam memperluas potensi yang dimiliki untuk dapat membangun dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki (Kuwena & Widyatmaja, 2017). Dalam kegiatan pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan aspek-aspek pembangunan, pengusaha, kebijakan dan lain sebagainya. Pariwisata sebagai salah satu kegiatan yang secara langsung dapat melibatkan peran pemerintah, masyarakat, swasta maupun pihak lainnya yang terlibat (Kuwena & Widyatmaja, 2017). Pariwisata juga dapat menjadi salah satu faktor dalam rangka meningkat kesejahteraan masyarakat serta pariwisata juga memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung baik dari segi pembangunan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Pariwisata menjadi salah satu ciri khas daerah Kabupaten Lampung Timur, seperti dengan adanya Taman Nasional Way Kambas di Lampung Timur. Bahkan di lokasi tersebut sering diadakan event-event seperti Festival Way Kambas, Pameran Indrogen 2017, dan lain sebagainya. (Rozak & R Basiya, 2012)

Potensi wisata yang dimiliki oleh Lampung Timur sangat banyak dan beragam. Terdapat keindahan alamnya yang dapat dijadikan sebagai objek wisata. Salah satu potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur yakni Taman Nasional Way Kambas (TNWK) (Rostiyati, 2013). TNWK didirikan pada tahun 1985 yang terletak di Provinsi

Lampung, lebih tepatnya berada di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional memiliki ekosistem asli yang dapat dikelola dengan mempunyai manfaat sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Selain itu, manfaatnya juga dapat melindungi flora dan fauna sehingga pelestarian tersebut harus dilakukan. Taman Nasional Way Kambas juga telah ditetapkan sebagai kawasan ASEAN Heritage Parks (AHP) yang memaksa Pusat Konservasi Gajah segera melakukan revitalisasi karena Taman Nasional Way Kambas sangat terkenal dengan satwa gajahnya. TNWK sebagai salah satu taman tertua di Indonesia dan sebagai pusat konservasi gajah, selain menjadi tempat untuk perlindungan gajah taman nasional ini juga sebagai tempat untuk pelatihan gajah. Potensi pariwisata di TNWK memiliki pengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Taman Nasional Way Kambas ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 670/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999. Kawasan Taman Nasional Way Kambas mempunyai luas lebih kurang 125,631.31 ha dan terletak di bagian tenggara Pulau Sumatera di wilayah Provinsi Lampung antara 40°37' – 50°16' Lintang Selatan dan antara 105°33' – 105°54' Bujur Timur. (<https://waykambas.org/sejarah-taman-nasional-way-kambas/>)

Taman Nasional Way Kambas ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam yang dapat bertujuan untuk melindungi kawasan yang kaya akan berbagai flora dan fauna. Namun, berdasarkan data statistik laju pertumbuhan pengunjung periode tahun 2015-2019 mengalami penurunan, kuantitas pengunjung domestik Taman Nasional Way Kambas menurun sebesar 8,5% dan pengunjung mancanegara menurun sebesar 16% (Miftahudin, 2021). Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kegiatan ekowisata yang ditawarkan setiap tahunnya tidak ada pembaruan, diantaranya yaitu atraksi gajah, memandikan gajah dan berkeliling menunggangi gajah pada jalur dengan potensi yang

kurang beragam. Keadaan yang ada sekarang menyebabkan kegiatan ekowisata di lokasi tersebut tidak dapat memberikan manfaat yang maksimal, oleh sebab itu untuk meningkatkan daya tarik pengunjung maka diperlukan adanya inovasi kegiatan wisata baru dengan tawaran potensi yang lebih menarik salah satu contohnya adalah berjelajah hutan dengan menunggangi gajah jinak pada jalur yang memiliki potensi lebih beragam. (Miftahudin, 2021)

Menurut Murti (2018) sisi menarik yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas seperti Jenis flora yang terdapat dalam kawasan TNWK antara lain Meranti (*Shorea sp*), Rengas (*Gluta rengas*), Kiara (*Ficus retusa*), Merbau (*Intsia palembanica*), Pulai (*Alstonia scholaris*), Mahang, Aren (*Arenga pinnata*), Serdang (*Livistonia rotundifolia*), Metroxylon elatun, Sempur (*Dillenia sp*), Damar (*Shorea Sp*), Keruing (*Dipterocarpus gracillis*) dan Puspa (*Schima walichii*), jenis semak, *Cyrum sp*, *Fimbrityllis sp*, *Ipomea* Cemara Pantai (*Casuarina equisetifolia*), Ketapang (*Terminalia cattapa*), Nyamplung (*Callophyllum inophyllum*), *Rhizopora*, *Bruguiera* dan lain-lain. Taman Nasional Way Kambas sebagai salah satu potensi wisata yang ada di Lampung Timur yaitu terdapat 5 jenis *nepenthes* yaitu jenis *N. gracilis*, *N. mirabilis*, *N. rafflesiana*, *N. ampullaria*, *N. hookeriana*. Selain itu, terdapat potensi wisata yang bersifat panorama alam seperti Pusat Konservasi Gajah (PKG), Suaka Rhino Sumatera (SRS), Way Kanan *Resort*, Pantai Kuala Kambas, *Resort* Totoprojo, Flora dan Fauna Taman Nasional Way Kambas. Sedangkan, potensi wisata yang bersifat sosial dan budaya yang berada di Taman Nasional Way Kambas seperti pertunjukan kesenian, kerajinan tangan, rumah adat Lampung.

Berdasarkan prasurevey yang dilakukan dalam pelaksanaan pengembangan Taman Nasional Way Kambas, khususnya di Pusat Konservasi Gajah (PKG) masih belum optimal. Seperti pada saat memasuki liburan, Taman Nasional Way Kambas tersebut dipenuhi oleh kendaraan bermotor dan parkir yang belum teratur. Penjagaan yang belum maksimal di lokasi tersebut terutama saat malam hari sehingga banyak dimanfaatkan untuk kegiatan yang kurang

baik terutama yang dilakukan anak remaja. Selain itu, infrastruktur yang belum berjalan dengan maksimal dan masih adanya jalan yang lubang sehingga membuat pengunjung merasa kurang nyaman dalam melakukan kegiatan pariwisata tersebut. Selain pengelolaan infrastruktur terutama parkir juga terdapat adanya pembangunan sarana pendukung di Taman Nasional Way Kambas yang masih sangat minim. Sehingga apabila wisata tersebut tidak dikembangkan dan dikelola dengan baik maka dapat mengakibatkan suasana wisata tersebut sepi pengunjung. Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya anggaran dari Pemerintah dalam pengembangan Taman Nasional Way Kambas karena membutuhkan anggaran yang besar untuk mengembangkan wisata Taman Nasional Way Kambas.

Padahal kebijakan pengembangan kawasan pariwisata telah diatur dalam Pasal 60 ayat 3 Peraturan Daerah Lampung Timur No 4 Tahun 2012 yang berbunyi untuk mewujudkan suatu kawasan pariwisata maka harus dilakukan diversifikasi atau pengembangan objek-objek wisata. Selain itu, dalam Pasal 52 huruf c Peraturan Daerah Lampung Timur No 4 Tahun 2012 juga menyatakan bahwa tema utama kawasan Wisata Unggulan Taman Nasional Way Kambas adalah wisata alam minat khusus yang mutlak harus dijaga kelestariannya. Jelas bahwa wisata Taman Nasional Way Kambas harus dijaga dan dilestarikan atau dikelola dengan baik. Dalam hal ini maka pemerintah dan swasta sangat berperan dalam mengembangkan objek wisata tersebut.

Peran pemerintah sebagai salah satu tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya. Sehingga tindakan maupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Pengelolaan pariwisata mempunyai sumber penggerak terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan. Akan tetapi pengembangan pariwisata dapat membangun semangat kebangsaan dan apresiasi

terhadap kekayaan seni budaya bangsa. Pemerintah memiliki peran dalam membuat regulasi maupun kebijakan, karena dengan adanya kebijakan tersebut dalam perencanaan jangka panjang diperlukan oleh pemerintah (Kuwena & Widyatmaja, 2017). Tentunya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor pendukung pemerintah dalam mengembangkan Taman Nasional Way Kambas. Dalam mendukung pengembangan Taman Nasional Way Kambas pemerintah telah menyediakan berbagai macam fasilitas.

Selain itu, peran swasta yaitu pihak pengelola Taman Nasional Way Kambas mengembangkan dan merawat sarana dan prasarana objek dan daya tarik wisata yang memerlukan peran serta berbagai instansi yang terkait salah satunya instansi pemerintah yaitu Dinas Pariwisata (Kuwena & Widyatmaja, 2017). Peran pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata dalam mengelola objek wisata di PKG-TNWK memang dinilai masih tidak merata dan berjalan secara maksimal. Perlu adanya upaya dalam kerja sama *stakeholder* antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas agar dapat bermanfaat lebih optimal dan dapat memberikan pengaruh bagi masyarakat sekitar objek wisata tersebut. Pengembangan pariwisata haruslah menyeluruh supaya dapat memperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi pendapatan, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sehingga dapat dilihat bahwa obyek wisata yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas telah dikelola dan dikembangkan dengan baik meskipun dalam pengelolaannya terdapat beberapa dalam pelaksanaan pengembangan tersebut belum berjalan dengan baik.

Dalam merencanakan pengembangan objek wisata tersebut harus juga dapat mengintegrasikan pengembangan objek wisata tersebut dalam program-program yang telah ditetapkan serta rencana tersebut harus mampu memberikan perubahan yang lebih baik dalam proses pengembangan pariwisata supaya dapat tercapainya suatu tujuan objek pariwisata yang mempunyai daya tarik dan daya jual baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mengacu

pada uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan dalam pengelolaan Taman Nasional Way Kambas dengan Judul: **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Taman Nasional Way Kambas”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat pengembangan objek wisata Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur?
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pengembangan objek wisata Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur?

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan bagi kita semua mengenai peran

pemerintah terhadap sarana dan prasarana di Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Timur. Perkembangan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pengayaan materi pengajaran dan penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian penelitian ini diharapkan mampu untuk dapat memberikan informasi tentang implementasi kebijakan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Lampung Timur agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini berupa

a. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur terkait implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lampung Timur dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambahkan wawasan dan literatur maupun memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung bagi kepastakaan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik khususnya tentang implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lampung Timur dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas.

c. Bagi peneliti

Manfaat yang didapatkan untuk peneliti sendiri adalah dapat digunakan sebagai suatu proses pembelajaran dan menambah wawasan pengetahuan tentang implementasi

kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Lampung Timur dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti pada masa lalu yang sekarang ini bisa menjadikan informasi sekaligus perbandingan yang dilakukan oleh penulis untuk membandingkan, sebagai bahan rujukan, sebagai kajian acuan, referensi dalam kajian teoritis penelitian terdahulu.

Berikut beberapa topic penelitian terdahulu :

1. Judul : “Faktor-Faktor Kepuasan Pengunjung Di Pusat Konservasi Gajah Taman Nasional Way Kambas Lampung” yang ditulis oleh Lulu Subangkit, Samsul Bakri, dan Susni Herwanti, Universitas Lampung, Indonesia, (2014) .

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pengunjung di Pusat Konservasi Gajah Taman Nasional Way Kambas yang dipengaruhi oleh faktor jarak, pelayanan, lama kunjungan, pendidikan perguruan tinggi, umur, jenis kelamin, asal pengunjung, tipe kelompok, motivasi berwisata, aktivitas kunjungan, dan karakteristik obyek di Pusat Konservasi Gajah yang berkaitan dengan kebersihan, fasilitas pengunjung, dan koleksi kegiatan. Metode penelitian yang dilakukan yaitu

2. Judul : “Implementasi Undang-Undang NO 10 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata Di Taman Nasional Way Kambas” yang ditulis oleh Mutia Herlita Putri, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia, (2019).

Penelitian ini berfokus pada pengembangan pariwisata di Taman Nasional Way Kambas yang berfokus pada Implementasi Undang-Undang NO 10 Tahun 2009

Tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata Di Taman Nasional Way Kambas mengenai penerapan, ketaatan serta pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Taman Nasional Way Kambas. Serta langkah-langkah yang dilakukan oleh taman nasional way kambas dan dinas pariwisata Lampung Timur dalam melakukan pengembangan maupun implementasi kawasan pariwisata yang berdasarkan pada Undang-Undang No 10 Tahun 2009 mengenai kerja sama pengembangan kawasan pariwisata di Taman Nasional Way Kambas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Metode yang digunakan untuk penelitian yaitu kualitatif. Dalam penelitian ini juga membahas tentang variabel-variabel suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, seperti komunikasi, sumber daya, personalia dan struktur organisasi.

3. Judul : “Pengembangan Kegiatan Ekowisata Di Taman Nasional Way Kambas Provinsi Lampung” yang ditulis oleh Heradz Gumilang, Unu Nitibaskara, dan Abdul Rahman Rusli, Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa, (2013).

Penelitian ini berfokus pada pengembangan sumber daya yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas. Terdapat adanya rencana pengembangan kegiatan ekowisata di Pusat Konservasi Gajah TNWK seperti Pembinaan Satwa Gajah, Pengembangan Unit Manajemen, Pengembangan Jalur Interpretasi dan Pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan potensi wisata seperti kegiatan wisata rekreasi, wisata petualangan, wisata minat khusus dan wisata pendidikan. Serta untuk mengetahui persepsi pengunjung terhadap kegiatan wisata di taman nasional way kambas khususnya di Pusat Konservasi Gajah. Metode yang digunakan untuk penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif yang hasilnya meliputi Potensi Sumberdaya Wisata, Persepsi Pengelola dan Peran Serta Masyarakat, Karakteristik, Motivasi dan Persepsi Pengunjung, dan Pengembangan Kegiatan Ekowisata.

4. Judul : “Revitalisasi Pusat Konservasi Gajah Di Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur” yang ditulis oleh Mona Fijriani, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2017).

Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan untuk melindungi gajah yang berkaitan dengan aktivitas yang berhubungan dengan fasilitas sarana dan prasarana. Sehingga diperlukan dengan adanya pengembangan dan optimalisasi terkait dengan pembinaan habitat gajah tersebut. Dalam mengembangkan dan memajukan pengoptimalisasian habitat gajah diperlukan dengan memperhatikan sarana dan prasaran supaya memudahkan gajah dalam mempermudah dalam menjalankan aktivitasnya.

5. Judul : “Daya Tarik Taman Nasional Way Kambas Sebagai Destinasi Wisata Di Lampung” yang ditulis oleh Sulih Andoyo Murti, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, (2020).

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan kawasan di Taman Nasional Way Kambas yang bekerja sama dengan melibatkan berbagai pihak untuk memajukan Taman Nasional Way Kambas. Dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan mampu memberikan perubahan maupun kemajuan yang signifikan. Penelitian ini juga menganalisis adanya berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi di Taman Nasional Way Kambas.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Implementasi

Implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian implementasi lainnya dapat diartikan bahwa implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan suatu kebijakan dalam masyarakat sehingga kebijakan

tersebut bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang di harapkan (Usman, 2004). Menurut Mulyadi (2015) implementasi adalah suatu kegiatan yang sudah terencana yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan dilengkapi oleh sarana prasarana yang mendukung berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Kebijakan sebagai salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dalam suatu area maupun lingkungan yang diharapkan mampu mengatur perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan cita-cita, tujuan, prinsip maupun pedoman supaya sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Sehingga kebijakan sebagai salah satu rangkaian konsep dan asas yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah kebijakan secara umum dapat digunakan sebagai sesuatu proses yang dapat tertuju terhadap perilaku seseorang atau aktor dalam menyelesaikan suatu bidang tertentu sehingga kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang dapat mengarah terhadap tujuan yang dapat disusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam bidang tertentu berkaitan dengan adanya berbagai hambatan-hambatan yang akan dilakukan (Kusumanegara, 2010).

Terdapat adanya suatu permasalahan sebagai salah satu unsur penting dalam kebijakan karena dengan adanya kesalahan dalam menentukan kebijakan tersebut berpengaruh dalam proses penyusunan kebijakan. Sehingga apabila permasalahan dapat diidentifikasi dengan tepat maka dalam proses penyusunan kebijakan dapat berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan dapat digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman dalam melaksanakan tindakan baik yang bersifat positif maupun negatif. (Abidin, 2008)

1.6.2 Implementasi Kebijakan

Indiahono (2009) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah

benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcomes* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. *Outcomes* biasanya diatur dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan (Indiahono, 2009).

Wahab (2008) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakn sebelumnya. Wahab (2008), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Winarno (2012) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dimaknai bahwa implementasi kebijakan publik adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan antar stakeholder yaitu pemerintah, swasta dan

masyarakat yang merupakan realisasi dari suatu kebijakan publik untuk menghasilkan suatu hasil, dampak dan manfaat bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.6.3 Model Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan menurut George C Edward III dalam Widodo, (2010) implementasi kebijakan di bedakan menjadi 4 variabel yaitu:

1) Komunikasi

Ada tiga indikator yang dapat kita pakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu: Transmisi, dimana cara penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik. Yang kedua yaitu kejelasan dimana dalam indikator ini komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Yang terakhir yakni konsistensi dimana perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk dijalankan.

2) Sumber Daya

Meskipun suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila dalam pengimplementasiannya kekurangan sumber daya untuk melaksanakan dan menjalankan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Dalam sumber daya terbagi dari beberapa sumber daya seperti sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

3) Disposisi

Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang erat hubungannya dengan implementor kebijakan. Karakterer yang sangat penting dimiliki oleh seorang implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.

4) Struktur Organisasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang menjadi konsep utama (pokok) yang diamati dalam penelitian, yang disertai dengan operasionalisasi tolok ukur atas konsep tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka operasionalisasi konsep dalam penelitian ini akan dilihat berdasarkan model implementasi kebijakan dari George Edward III dengan variabel sebagai berikut:

1. Komunikasi

- a. Transmisi, dimana cara penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik. Komunikasi tersebut antar lembaga implementator dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas.
- b. Kejelasan dimana dalam indikator ini komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas harus jelas dan tidak membingungkan.
- c. Konsistensi dimana perintah dari kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas harus jelas dan tidak membingungkan sehingga pelaksanaannya harus konsisten dan jelas untuk dijalankan.

2. Sumber Daya

- a. Sumber daya manusia

Lembaga implementator kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas yang dilihat dari segi pendidikan, pemahaman terhadap kebijakan serta pola pengarahannya;

b. Sumber daya finansial

Lembaga implementator kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas yang dilihat dari dana yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Disposisi

a. Kejujuran implementator/pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas.

b. Komitmen implementator untuk tidak melanggar kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas.

c. Demokratis terhadap permasalahan bersama, mencari solusi bersama antara lembaga implementator dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas.

4. Struktur Birokrasi

Kesesuaian penerapan SOP dan segala jenis peraturan yang seharusnya diterapkan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bersumber data-data. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moeloeng, 2007)

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Labuhan Ratu VII tepatnya di Taman Nasional Way Kambas yang nantinya akan terjun langsung ke desa-desa. Adapun pemilihan dalam penelitian ini di Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur sebab yang mengatur maupun yang mengelola terkait pengembangan objek wisata di dinas tersebut.

1.8.3 Informan

Pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2010) *purposive sampling* adalah penentuan sampel penelitian dengan langkah maupun tahapan-tahapan agar data pada selanjutnya dapat diproses secara representif.

Adapun beberapa karakteristik informan yang sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur.
- b. Petugas yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas.
- c. DPRD Komisi Terkait.
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait.
- e. Pengunjung yang terlibat dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas.

- f. Masyarakat maupun warga setempat yang terlibat dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas.

1.8.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer

Data primer merupakan pengambilan data yang dilakukan secara langsung (mendapatkan data dari informan) yaitu datang ke tempat penelitian.

- b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pengambilan data yang dilakukan secara tidak langsung. Data ini diperoleh dari berbagai sumber informasi seperti literatur, jurnal, buku dan penelitian penelitian terdahulu.

1.8.5 Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa cara seperti observasi, wawancara dan dokumentasi

- a. Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan proses pengamatan secara langsung. Observasi ini dilakukan terhadap sesuatu yang bisa diamati yang terlibat langsung mengenai Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas.

- b. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015) wawancara adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, ide, maupun data yang dilakukan melalui tanya jawab dengan dua orang atau lebih untuk mencari makna pada topic tertentu. Dalam

penelitian ini, penulis berencana menggunakan wawancara dengan beberapa informan yang terlibat yaitu kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Timur, petugas yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait, pengunjung yang terlibat dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas, dan masyarakat maupun warga setempat yang terlibat dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan yang berupa foto/gambar terkait kegiatan dalam penelitian peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata di Taman Nasional Way Kambas.

1.8.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ada beberapa tahap seperti reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan

a. Reduksi Data

Reduksi data bertujuan untuk meringkas atau menyederhanakan suatu data yang diperoleh dan memastikan data yang diperoleh berkaitan dengan lingkup yang diteliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah data data yang disajikan atau data yang sudah terkumpul untuk tujuan bersama.

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan salah satu tahapan yang terakhir dalam menganalisis data. Kesimpulan juga merupakan inti dari keseluruhan data data yang ditarik menjadi satu benang dan menjadikan sebuah hasil.